

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

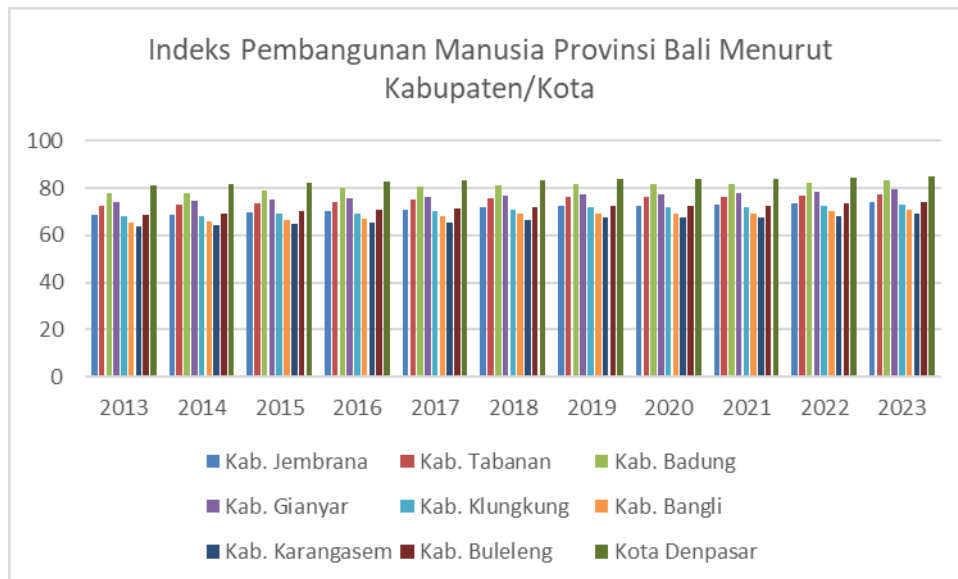
Paradigma pembangunan selalu dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang seolah melupakan eksistensi manusia itu sendiri sebagai pemeran utama dalam keberlangsungan pembangunan. Pembangunan dapat dipahami sebagai suatu proses transformasi yang berlangsung secara berkelanjutan dan bertujuan untuk menciptakan kondisi kehidupan yang lebih baik. Pada awalnya, sumber daya manusia dianggap semata-mata sebagai salah satu faktor produksi, sejajar dengan tanah, modal, dan teknologi (Mongan, J.J.S. 2019). Namun, seiring perkembangan pemikiran, muncul kesadaran bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak secara otomatis menjamin peningkatan kesejahteraan mayoritas penduduk. Hal ini tercermin dalam laporan Bank Dunia tahun 1991 yang menekankan bahwa tantangan utama dalam pembangunan adalah peningkatan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, pembangunan seharusnya dilihat sebagai proses yang bersifat multidimensi, mencakup perubahan dalam struktur sosial, pola pikir masyarakat, dan sistem kelembagaan nasional (Dewi, 2017).

Pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu indikator kunci dalam menilai keberhasilan pembangunan yang berdampak langsung terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, manusia tidak hanya diposisikan sebagai objek dari pembangunan, melainkan juga sebagai subjek aktif yang memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan daerah. Kontribusi aktif tersebut secara agregat turut memperkuat kemajuan pembangunan nasional. Selain itu, pembangunan tetap diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi,

pengurangan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Keberhasilan upaya pembangunan manusia secara menyeluruh dapat dilihat dari peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Mengacu pada informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), HDI pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990, dan sejak saat itu dipublikasikan secara berkala melalui laporan tahunan *Human Development Report* (HDR).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disusun berdasarkan tiga dimensi utama yang masing-masing memiliki indikator pengukurnya. Dimensi kesehatan direpresentasikan oleh indikator angka harapan hidup, dimensi pendidikan diukur melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, sedangkan dimensi ekonomi yang menggambarkan standar hidup layak diukur melalui indikator paritas daya beli, yang juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (Islamiastus & Martha, 2021). Ketiga dimensi ini tidak bersifat independen, melainkan saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Di Indonesia, IPM disajikan secara berkala setiap tahun pada berbagai tingkat administrasi, mulai dari nasional hingga provinsi dan kabupaten/kota. Menurut laporan Badan Pusat Statistik dalam publikasi *Indeks Pembangunan Manusia 2020*, penyajian IPM secara rutin per wilayah memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi pembangunan manusia, termasuk capaian, laju perkembangan, posisi relatif, serta kesenjangan antar daerah (Badan Pusat Statistik, 2020). Berdasarkan kategori yang diberikan oleh UNDP, yakni capaian pembangunan manusia dikategorikan menjadi kategori sangat tinggi ( $IPM \geq 80$ ), kategori tinggi ( $70 \leq IPM < 80$ ), kategori sedang ( $60 \leq IPM < 70$ ), dan kategori rendah ( $IPM < 60$ ).

**Gambar 1.1 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2023**



Sumber: BPS Provinsi Bali, 2013-2023.

Berdasarkan Gambar 1.1, terlihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Bali berdasarkan kabupaten/kota selama periode 2013 hingga 2023. Secara keseluruhan, setiap wilayah menunjukkan kecenderungan peningkatan nilai IPM dari tahun ke tahun. Tren positif ini mengindikasikan adanya kemajuan dalam pembangunan manusia, khususnya pada aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat di masing-masing daerah. Kota Denpasar secara konsisten memiliki IPM tertinggi selama periode tersebut, dengan angka mendekati atau bahkan melampaui 83 poin sejak tahun 2020 hingga 2023. Namun sebaliknya, Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Bangli menunjukkan angka IPM yang relatif rendah, berada di bawah 70 poin pada awal periode (2013–2015), dan meskipun mengalami peningkatan bertahap, tetap menjadi dua daerah dengan IPM terendah hingga tahun 2023, yang hanya mencapai kisaran 73–75 poin. Ketimpangan ini mencerminkan adanya disparitas dalam pembangunan manusia, khususnya dalam dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, antar

kabupaten/kota di Bali. Misalnya, pada tahun 2023, gap IPM antara Kota Denpasar dan Kabupaten Karangasem masih berada di atas 10 poin, yang menunjukkan kesenjangan signifikan. Kabupaten-kabupaten seperti Badung dan Gianyar cenderung memiliki IPM tinggi dan stabil, menyusul Denpasar, sementara Kabupaten Buleleng, Klungkung, dan Jembrana berada di posisi menengah. Ketimpangan ini menunjukkan perlunya strategi pembangunan yang lebih merata dan inklusif di seluruh wilayah Bali.

IPM kabupaten/kota di provinsi Bali dikatakan relatif tinggi, namun masih ada ketimpangan antara daerah perkotaan dan daerah yang lebih terpencil. Hal ini dikarenakan Bali merupakan daerah yang perekonomiannya sangat bergantung pada sektor pariwisata yang menjadikan struktur ekonomi dan fiskalnya rentan terhadap guncangan. Wilayah yang memiliki destinasi wisata lebih banyak cenderung lebih maju daripada wilayah terpencil seperti Denpasar dan Badung yang lebih maju dibandingkan dengan Karangasem atau Jembrana. Dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan manusia, kebijakan desentralisasi fiskal memiliki peran penting.

Desentralisasi fiskal memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan di wilayahnya. Kebijakan ini diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, serta meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat (Nadeak et al., 2022). Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat mengalokasikan anggaran secara lebih tepat sasaran dan efisien, khususnya untuk sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Optimalisasi pengelolaan

anggaran ini pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dilandasi oleh asumsi bahwa pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap kebutuhan spesifik masyarakatnya serta standar layanan publik yang sesuai dengan kondisi lokal. Oleh karena itu, pemberian kewenangan yang lebih luas kepada daerah dipandang sebagai strategi penting dalam mempercepat pembangunan ekonomi berbasis lokal yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pertumbuhan ekonomi memegang peranan krusial sebagai salah satu penunjang dimensi pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena mencerminkan peningkatan output per kapita yang pada titik tertentu akan berdampak pada naiknya upah riil serta membaiknya standar hidup masyarakat (Ariza, 2016). Menurut BPS Provinsi Bali, pertumbuhan ekonomi di sebagian besar wilayah Bali relatif stabil dengan angka rata-rata berkisar antara 5% hingga 7%. Kabupaten Badung secara konsisten mencatatkan pertumbuhan tertinggi, yang mencerminkan dominasinya dalam sektor pariwisata. Meskipun pada tahun 2020, dampak pandemi sangat terasa dengan semua daerah mengalami kontraksi ekonomi. Penurunan terbesar terjadi di Kabupaten Badung (-16,55%) dan Kota Denpasar (-9,44%) yang dimana ini menunjukkan kerentanan wilayah tersebut terhadap guncangan di sektor pariwisata. Sementara kabupaten seperti Jembrana dan Bangli mengalami dampak yang lebih kecil karena struktur ekonominya yang lebih terdiversifikasi. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan pendapatan

penduduk di wilayah tersebut yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi terhambat.

Ketimpangan pendapatan dapat tercermin melalui rasio gini yang menjadi salah satu indikator penting dalam memahami tingkat kesenjangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Rasio gini mengukur sejauh mana distribusi pendapatan atau kekayaan dalam masyarakat menyimpang dari pemerataan sempurna. Indikator ketimpangan pendapatan memiliki hubungan yang signifikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mengukur kualitas hidup masyarakat melalui tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan taraf hidup yang layak. Ketimpangan pendapatan yang tinggi cenderung menghambat pencapaian IPM karena kelompok masyarakat berpendapatan rendah sering menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Sebaliknya, distribusi pendapatan yang lebih merata berpotensi mendorong peningkatan IPM dengan memperluas akses terhadap kebutuhan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketidakeimbangan dalam distribusi pendapatan dapat menghambat pembangunan manusia dan berdampak pada menurunnya kesejahteraan serta kesetaraan sosial di suatu daerah (Bengung et al., 2023).

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini akan menganalisis sejauh apa pengaruh derajat desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan rasio gini mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di seluruh kabupaten/kota Provinsi Bali. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Rasio Gini Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali?
3. Bagaimana pengaruh rasio gini terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali?
4. Apakah derajat desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan rasio gini secara simultan berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
3. Untuk mengetahui pengaruh rasio gini terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
4. Untuk mengetahui pengaruh derajat desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan rasio gini secara simultan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

#### **1.4 Ruang Lingkup**

Penelitian ini memfokuskan pada pengaruh variabel independen yang meliputi Derajat Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Rasio Gini terhadap variabel dependen, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Cakupan studi ini mencakup seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam kurun waktu 2013 hingga 2023, dengan tujuan menganalisis hubungan ketiga variabel tersebut terhadap dinamika pembangunan manusia di tingkat daerah. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi panel. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait lainnya. Model regresi panel akan digunakan untuk menganalisis hubungan antara derajat desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan rasio gini terhadap indeks pembangunan manusia.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Sebagai bahan studi untuk kalangan akademisi sebagai tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang derajat desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, rasio gini, serta indeks pembangunan manusia.
2. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan permasalahan yang sama sehingga dapat dikembangkan, dan dapat dijadikan pembandingan bagi peneliti lainnya.